

# KESEJAHTERAAN EKONOMI RAKYAT ; DI ANTARA HARAPAN DAN REALITAS

Oleh

**Qurratul A'yun Nailufarh**

FE-UMSurabaya

Email : [nailurufah@yahoo.co.id](mailto:nailurufah@yahoo.co.id)

## Abstrak

Indonesia merupakan Negara dengan keanekaragaman budaya yang unik, namun apa yang terjadi bila keanekaragaman tersebut menjadi keanekaragaman dalam hal ekonomi yang tidak seimbang. Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dinilai semakin menjauh dari tingkat kesejahteraan, hal ini bisa dilihat dari faktor pemicu terjadinya kesenjangan dimasyarakat karena krisis ekonomi yang sedang dialami bangsa Indonesia beberapa saat lalu. Sehingga menimbulkan ketimpangan dalam perekonomian, meningkatkan angka kemiskinan dan menambah jumlah pengangguran dimasyarakat. Banyak pihak beranggapan mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat sebagai manusia yang saling bersaudara dan sama-sama diciptakan oleh satu Tuhan, saat ini, hanyalah sebuah impian. Hal itu terjadi karena adanya penolakan menggunakan mekanisme filter yang disediakan oleh penilaian berbasis moral, di samping makin melemahnya perasaan sosial yang diserukan agama. Dalam hal ini perlu adanya pemecahan masalah bagi semua pihak dan kerjasama yang baik dari masyarakat agar tidak selalu bergantung pada kemampuan pemerintah dalam membantu masalah kehidupan perekonomian mereka tersebut.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang sangat serius karena kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin sangat nyata, seperti yang diungkap oleh pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Indonesia Sutrisno Iwantono. Jika melihat kondisi perekonomian Indonesia yang secara makro menunjukkan performa yang baik, di sisi lain realitas ketimpangan dan kemiskinan yang masih menyelimuti sebagian besar rakyat Indonesia bisa dikatakan proposisi pertama dari hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan menemui kebenarannya di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai masih belum cukup untuk mengabsorpsi permasalahan krusial yang dihadapi bangsa ini. Persoalan yang perlu dicermati lebih jauh adalah bagaimana mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat dengan membuka katup-katup pembatas saluran distribusi pendapatan dan peluang atau kesempatan ekonomi yang pada gilirannya akan mengalirkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al'Araaf ayat 96: *"Jika kamu sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan*

*perbuatannya*”. Dari firman Allah SWT tersebut dapatlah kiranya kita fahami bahwa sebuah negara akan sejahtera dan makmur apabila rakyat dinegara tersebut beriman dan bertaqwa kepada Tuhan tetapi sebaliknya apabila rakyat disuatu negeri tersebut jauh dari beriman dan bertaqwa kepada Tuhan maka siksa yang akan mereka terima.

Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebuah negara tidak ditentukan oleh usia sebuah negara, besar atau kecil sebuah negara, jumlah penduduk, sumber daya alam, sumber daya manusia, sistem liberal kapitalis, sistem sosial komunis atau sistem demokrasi yang ada disuatu negara. Sejarah mencatat bahwa negara-negara seperti Inggris dan Thailand adalah negara-negara yang mempunyai usia ribuan tahun, rakyat Inggris bisa dikategorikan sudah sejahtera dan makmur tetapi rakyat Thailand belum sejahtera dan makmur seperti Rakyat Inggris. China dan Indonesia adalah negara terbesar dan terbanyak penduduknya, rakyat China sudah mulai sejahtera dan makmur sedangkan rakyat Indonesia masih banyak yang miskin dan tertinggal.

Banyak pihak beranggapan mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat sebagai manusia yang saling bersaudara dan sama-sama diciptakan oleh satu Tuhan, saat ini, hanyalah sebuah impian. Untuk itu bagaimana saat ini bangsa Indonesia bisa menjadikan segalanya lebih baik dan tetap berusaha menciptakan kesejahteraan disamping dengan adanya permasalahan yang krusial yang sedang menimpa negara kita agar impian menuju negara yang sejahtera tersebut dapat dicapai.

Terciptanya kesejahteraan ekonomi rakyat merupakan salah satu tujuan utama berdirinya negara Republik Indonesia. Yang dimaksud sejahtera adalah keadaan sentosa dan makmur serta berkecukupan, baik dalam dimensi fisik maupun nonfisik. Defenisi “kesejahteraan” dalam sistem ekonomi kapitalis-konvensional merupakan konsep materialis murni yang menafikan keterkaitan ruhaniah. Akan tetapi, sebagian masyarakat menginginkan kesejahteraan lahir batin, yang berarti bahwa kesejahteraan yang diinginkan adalah tidak menafikan dan mempunyai ketersinggungan dengan aspek ruhaniah.

### **Kajian Teori**

Konsep “kesejahteraan” yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan keruhaniaan, tentu akan berakibat pada keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi apa hakekat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya. Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan tersebut tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata, tetapi juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Paradigma kesejahteraan ekonomi rakyat memang sangat perlu diupayakan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya-upaya ke arah tingkat kesejahteraan ekonomi tersebut selama ini dianggap cukup memadai melalui peningkatan kemakmuran rakyat (pembangunan ekonomi) atau melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang hasilnya memang sejauh ini masih belum menggembirakan.

Terbukti bahwa berbagai upaya dan beberapa program-program pemerintah yang banyak tidak berhasil, terutama karena dilaksanakan dalam kerangka sistem ekonomi pasar bebas yang kapitalistik liberal, yang tidak peduli pada "nasib" rakyat kecil dan membiarkan terjadinya persaingan liberal antara konglomerat dan ekonomi rakyat. Inilah masalah besar sistem perekonomian yang kini berjalan di Indonesia.

Sehubungan dengan usaha penciptaan kesejahteraan ekonomi rakyat tersebut, agenda pemerintah yang telah ditetapkan tersebut merupakan agenda untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat, dimana agenda ini diarahkan pada pencapaian lima sasaran pokok, yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah;
3. Meningkatkan kualitas manusia,
4. Membaiknya mutu lingkungan hidup, dan
5. Meningkatnya dukungan infrastruktur.

Sedangkan terdapat juga agenda kinerja pemerintah dalam bidang kesejahteraan ekonomi rakyat yang diuraikan dalam delapan bidang, yaitu:

- a) Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- b) Ekonomi;
- c) Pembangunan daerah;
- d) Sumber daya manusia;
- e) Agama;
- f) Sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g) Infrastruktur dan;
- h) Penanggulangan pascabencana alam.

Dilihat dari segi realitas saat ini, agenda tersebut sebagian besar tidak dapat dijalankan dengan benar, justru semakin membuat masyarakat kecil mengalami kesenjangan hidup yang semakin meningkat dalam hal perekonomian yang semakin sulit, ditambah lagi dengan berbagai macam persoalan perekonomian negara, mulai dari permasalahan kenaikan harga BBM, krisis energi, krisis pangan yang mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok, dan lain sebagainya.

Kesejahteraan ekonomi sangat sulit dicapai bila keadaan perekonomian tidak semakin membaik, dan masalah ekonomi dianggap wilayah kecil yang merupakan bagian dari wilayah besar masyarakat. Dengan perkembangan masyarakat yang makin kompleks, kehidupan ekonomi menjadi makin penting dan lama-kelamaan dalam sistem (ekonomi) kapitalisme seakan-akan menjadi jauh lebih penting daripada masyarakat sendiri. Masyarakat Indonesia telah menyadari bahwa krisis yang dihadapi sejak 1997 merupakan krisis multidimensi (politik, ekonomi, budaya), namun orang cenderung dengan mudah menyebutnya sebagai krisis ekonomi.

Pengangguran dan kemiskinan berhubungan erat dengan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi, yang ditentukan oleh pertumbuhan investasi dan ekspor, bila pertumbuhan tersebut ingin berkelanjutan (*substainable*). Mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang sampai sekarang hampir mencapai 80% ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM yang mempengaruhi perekonomian secara menyeluruh, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah tidaklah mudah dan segala

macam kendala yang muncul harus selalu diatasi salah satunya seperti kegiatan pemberantasan korupsi yang harus selalu dijalankan.

Mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia dapat dicontohkan pada persoalan pangan yang terus menghantui Indonesia. Mengenai kesejahteraan ekonomi rakyat, tentulah akan sangat jauh diharapkan bila tidak ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Akan tetapi terdapat permasalahan yang sangat serius bila dalam hal krisis pangan pemerintah masih perlu untuk melakukan impor, karena kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit.

Salah satu contoh, Indonesia akan mengimpor benih dari China, dan hal ini dapat berakibat matinya para penangkar benih dalam negeri, yang pada gilirannya akan menciptakan ketergantungan impor benih dari China. Rakyat juga menyaksikan bagaimana pemerintah tidak mampu mengatasi jalan-jalan yang berlubang di berbagai daerah, biaya angkutan yang mahal, banjir di berbagai tempat, termasuk juga di Jakarta, bahan pokok yang harganya terus meningkat, PLN yang sering padam, bahkan juga di daerah tempat sumber energi migas dan batu bara, seperti Kaltim dan Riau, gas dan batu bara dijual dengan harga murah.

Selanjutnya dalam masalah infrastruktur, irigasi di Indonesia banyak yang rusak dan belum ada perbaikan serius. Demikian juga tidak ada pembangunan irigasi baru serta pencapaian swa sembada pangan yang dinilai akan terhambat jika benih masih menjadi soal dan masalah tersebut akan semakin menambah ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan ekonomi menjadi penyebab utama disintegrasi bangsa. Karena itu, pemberdayaan ekonomi rakyat harus digalakkan oleh para pemuka masyarakat, dan kerjasama yang baik dengan pemerintah.

Kondisi di atas tersebut bisa saja merintang upaya pemerintah yang menyusun target cukup berani dalam memberantas kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 ditargetkan pengurangan angka kemiskinan dari 18,2 persen tahun 2002 menjadi 8,2 persen tahun 2009. Adapun angka pengangguran terbuka diharapkan turun dari 8,1 persen tahun 2002 menjadi 6 persen tahun 2009.

Dengan kenaikan harga pangan dan BBM, orang miskin berpotensi meningkat sebesar 15 persen, atau tambahan 19,01 juta jiwa lebih (sehingga total orang miskin mencapai 56,6 juta jiwa) pada tahun ini; sementara tambahan pengangguran terbuka baru bisa mencapai 18,61 jiwa sehingga total penganggur terbuka mencapai 29,94 juta jiwa.

Kondisi ini membuat semua pencapaian makro ekonomi yang dibuat pemerintah akan sia-sia. Inflasi yang meningkat akan menggerogoti pertumbuhan serta meluasnya kemiskinan dan pertambahan pengangguran akan menurunkan daya beli. Menurut APBN-P, inflasi 2008 ditargetkan 5,6 persen, sementara pada periode Januari-April sudah mencapai 4,1 persen. Situasinya menjadi benar-benar kompleks dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negeri kita; begitu banyak faktor instabilitas yang terjadi bersamaan, dan Negara kesejahteraan tidak akan tercapai jika kita tidak mengambil langkah baru dalam masalah utang luar negeri kita yang sudah demikian menumpuk.

Secara khusus, masalah pokok ekonomi rakyat seperti kemiskinan dan pengangguran, besar kemungkinan akan tetap bertahan. Bahkan, jika pemerintah akhirnya benar-benar dipenuhi oleh para agen kepentingan modal internasional akan suatu investasi, birokrat, pengusaha, atau akademisi, tidak tertutup kemungkinan situasi yang lebih buruk bisa terjadi.

Situasi yang lebih buruk ini tidak hanya bisa terjadi karena terus dipaksakannya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal yang menyengsarakan rakyat, seperti penghapusan subsidi, liberalisasi ekonomi, dan privatisasi BUMN, tetapi juga karena munculnya perlawanan sengit terhadap pelaksanaan agenda-agenda tersebut, yang berakibat pada terjadinya kekacauan ekonomi. Padahal, tanpa kekacauan ekonomi sekali pun, secara ekonomi dan politik, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat bukanlah perkara mudah. Secara ekonomi, di luar intervensi langsung kepentingan modal internasional, ekonomi Indonesia sesungguhnya terlanjur terperangkap oleh masalah-masalah struktural yang tergolong cukup berat

Masalah-masalah itu antara lain adalah: sentralisasi pengelolaan keuangan negara yang sangat berlebihan di tangan pemerintah pusat, volume bisnis korupsi yang hampir setara dengan volume APBN, volume pembayaran angsuran pokok dan bunga utang yang menguras sepertiga APBN, kenaikan harga minyak bumi yang berakibat pada terjadinya pembengkakan subsidi BBM, dan sangat derasnya arus impor ke Indonesia yang jelas jadi penyebab semakin terpinggirkannya ekonomi rakyat. Artinya, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat mustahil dapat dilakukan hanya dengan menggelar program-program yang bersifat karitatif dan parsial. Dalam jangka pendek, program-program seperti itu mungkin menolong. Tetapi jika kesejahteraan rakyat benar-benar hendak ditingkatkan secara permanen, dilakukannya sejumlah perombakan struktural terhadap perekonomian Indonesia mustahil dielakkan.

Berikut terdapat penjelasan mengapa di Indonesia masih dinilai belum bisa menciptakan negara dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang baik:

- ✚ Figur kemiskinan yang tidak banyak mengalami perbaikan, dan peran negara yang nyaris tidak dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai negara berkembang, ada banyak hal yang sebenarnya patut dimaklumi. Dalam konteks dunia seperti sekarang ini, Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai *failed-state* (seperti misalnya negara-negara *great-lakes* Afrika), tidak juga negara yang jatuh dalam belenggu hutang yang begitu mematikan (misalnya seperti *Nicaragua*). Tetapi, harus diakui, Indonesia dekat dengan situasi itu.

Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi dan ini jelas menunjukkan tantangan kepada pemerintah untuk mengubah kekuatan produktif masyarakat menjadi sumber daya yang sanggup mengatasi kemiskinan itu sendiri. Setidaknya 49% dari masyarakat jauh dari cukup untuk dapat hidup memadai sehari-hari.

- ✚ Munculnya bentuk dan dinamika perdagangan dan industri yang amat cepat, cangguh, dan sulit untuk diikuti.

Dinamika perdagangan yang langsung secara praktis dirasakan oleh sebagian terbesar masyarakat di Indonesia antara lain dalam bentuk kehadiran barang murah dalam jumlah yang amat banyak, berpindahnya pabrik dari Indonesia ke, misalnya, Vietnam, kesulitan memasarkan barang dan jasa dari Indonesia ke pasar internasional. Selain itu ada banyak kesepakatan yang masyarakat tidak tahu, tetapi dampaknya terkena pada kehidupan masyarakat banyak.

✚ Lalu-lintas manusia: dalam komunikasi, dalam transportasi dan perpindahan tempat, jumlah dan sebagainya.

Perkembangan transport, dan juga perkembangan ekonomi di luar Indonesia, mendorong sebagian besar orang untuk pergi ke luar Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jumlah mereka yang pergi ke luar Indonesia jauh melebihi mereka yang datang ke Indonesia. Selain itu, mereka yang datang ke Indonesia, seringkali terlibat dalam ekonomi informal yang seringkali mempunyai kadar kriminal yang tinggi.

## **Pembahasan**

### **Pandangan Islam; Solusi Ekonomi**

Perekonomian Indonesia saat ini benar-benar mengalami ketimpangan dalam distribusi kekayaan, ketidakseimbangan dalam wilayah geografis, kesenjangan antara sektor ekonomi dan sosial, juga terjadi ketimpangan antara pusat industri dan daerah pertanian. Selain itu juga mengalami ketergantungan yang luar biasa sebagai pengaruh berkepanjangan dari warisan hubungan ekonomi kolonial sebagai prototipe pola hubungan 'pusat-pinggiran' (*centre-periphery relationship*).

Dunia Islam mengalami paradoks, ketika menggunakan prototipe pertumbuhan sebagai pola pembangunan yang dirancang pakar dan praktisi barat yang kemudian 'dijual' kepada perencana negara muslim melalui diplomasi internasional, tekanan ekonomi, infiltrasi intelektual dan cara lainnya. Dari berbagai kajian evaluasi kebijakan pembangunan dan kinerja ekonomi negara-negara muslim menunjukkan bahwa strategi imitasi gagal untuk menghasilkan kesejahteraan. Semua bukti menunjukkan bahwa usaha pembangunan selama ini masih lepas dari nafas Islami. Al-Qur'an dan As-Sunah merupakan titik rujukan kita yang paling mendasar.

Model kapitalis maupun sosialis serta derivasinya bukan merupakan *ideal type*, kendatipun kita juga dapat mengumpulkan sumber-sumber yang bermanfaat untuk diadaptasikan atau diintegrasikan dalam kerangka Islam tanpa harus mengurangi nilai-nilai normatif yang ada. Teori pembangunan seperti yang dikembangkan di Barat (negara-negara kapitalis, sosialis dan penganut derivasinya) banyak dipengaruhi oleh karakteristik unik, masalah spesifik, nilai eksplisit dan implisit serta infrastruktur sosial-politik-ekonomi yang khas dari kaznah peradabannya.

Sehingga akan terjadi kesulitan besar dan bahkan cenderung kontraproduktif ketika dipaksakan untuk diadopsi secara penuh kedalam masyarakat muslim, hal ini disebabkan adanya perbedaan mendasar yang membentuk bangunan kemasyarakatan dari masing-masing peradaban. Pendekatan Islam haruslah jelas-jelas bersifat ideologis dan berorientasi pada nilai-nilainya. Konsep

pembangunan senantiasa terikat oleh kondisi budaya, sosial dan politik setempat. Pembangunan dalam Islam mempunyai pengertian khusus dan unik. Beberapa aspek pembangunan seperti keadilan sosial dan hak asasi (*social justice and human rights*), mempunyai persamaan dengan konsep barat, meskipun banyak perbedaan dan memiliki dasar pokoknya yang berbeda.

Keberadaan sistem ekonomi Islam merupakan konsekuensi dari pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*). *Worldview* Islam yang menjadi dasar ini oleh para Ulama dan Cendekiawan muslim disebut dengan berbagai istilah; Maulana al-Maududi mengistilahkannya dengan *Islami nazariat (Islamic Vision)*, Sayyid Qutb menggunakan istilah *al-Tasawwur al-Islami (Islamic Vision)*, Mohammad Atif al-Zayn menyebutnya *al-Mabda' al-Islami (Islamic Principle)*, sedangkan Prof. Syed Naquib al-Attas menamakannya *Ru'yatul Islam lil Wujud (Islamic Worldview)*.

Meskipun secara istilah terjadi perbedaan penyebutan tetapi secara esensi terdapat kesamaan keyakinan para Ulama' dan Cendekiawan tersebut bahwa pandangan hidup (*worldview*) seorang muslim haruslah menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, yang menjanjikan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akherat. *Worldview* ini lahir dari adanya konsep-konsep Islam yang mengkristal menjadi kerangka berfikir (*mental framework*).

Islam pada hakekatnya merupakan panduan pokok bagi manusia untuk hidup dan kehidupannya, baik itu aktifitas ekonomi, politik, hukum maupun sosial budaya. Islam memiliki kaidah-kaidah, prinsip-prinsip atau bahkan beberapa aturan spesifik dalam pengaturan detil hidup dan kehidupan manusia. Islam mengatur hidup manusia dengan kefitrahannya sebagai individu (hamba Allah SWT) dan menjaga keharmonian interaksinya dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan.

Dalam aktifitas kehidupan manusia, beberapa aspek aktifitas tersebut memiliki sistemnya sendiri-sendiri, misalnya aspek ekonomi, hukum, politik dan sosial budaya. Dan Islam yang diyakini sebagai sistem yang terpadu dan menyeluruh tentu memiliki formulasinya sendiri dalam aspek-aspek tersebut. Sistem ekonomi Islam, sistem hukum Islam, sistem politik Islam dan sistem sosial-budaya Islam merupakan bentuk sistem yang spesifik dari konsep Islam sebagai sistem kehidupan. *Worldview* Islam memberikan pijakan bahwa bahwa umat manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan seluruh sumber kehidupan (*resources*) yang tersedia adalah amanah-Nya, maka secara otomatis umat manusia memiliki hubungan persaudaraan yang alamiah dan mereka juga harus bertanggungjawab kepada-Nya.

Oleh karena itu, manusia tidak secara mutlak bebas untuk melakukan apa saja, akan tetapi mereka diharapkan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas (*limited resources*) dan berinteraksi antara satu dengan lainnya serta membangun lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mendukung usaha perwujudan kesejahteraan bersama (*mutual welfare*) setiap individu, tanpa melihat apakah mereka kaya atau miskin, hitam atau putih, lelaki atau perempuan serta anak-anak atau orang dewasa. Manusia juga diharapkan untuk tidak saja menjamin pencapaian tujuan materi, akan tetapi juga tujuan spiritual dan kemanusiaan, khususnya tentang keharmonisan sosial dan penghapusan *anomie*.

Kebijakan pembangunan islami yang ideal harus berorientasi untuk: meningkatkan tingkat spiritual masyarakat Islam dan meminimalisasi kerusakan moral dan korupsi; memenuhi kewajibannya untuk kesejahteraan ekonomi dalam batas-batas sumber daya yang tersedia; dan menjamin keadilan distributif dan memberantas praktik eksploitasi. Islam mengajarkan falsafah kesejahteraan yang unik, komprehensif dan konsisten dengan fitrah manusia. Sebuah doktrin yang melekat dan menyatu dalam kepribadian masyarakat (*built-in in-doctrination*). Kesejahteraan individu dalam masyarakat Islam dapat terealisasi bila ada iklim yang cocok bagi: pelaksanaan nilai-nilai spiritual Islam secara keseluruhan untuk individu maupun masyarakat; pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup; dan menitikberatkan pada nilai-nilai moral.

Untuk menjaga nilai spiritualitas, maka sebuah negara Islami harus menuju pada tiga arah; pertama, menciptakan suasana yang kondusif bagi tegaknya rumah tangga yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan bagi generasi baru. kedua, berusaha menciptakan sistem pendidikan yang dijiwai semangat Islam, ketiga menegakkan nilai-nilai dan norma Islam berupa penegakan hukum (*legal enforcement*). Juga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok manusia seperti; pelatihan dan pendidikan, tersedianya lapangan kerja (pekerjaan, profesi, bidang perdagangan), pakaian yang cukup, perumahan yang nyaman, lingkungan yang sehat dengan fasilitas kesehatan yang layak, dan fasilitas transportasi. Dan ketika kekuatan-kekuatan pasar tidak menguntungkan maka negara bisa berperan dengan kebijakan yang terbaik. Peranan positif negara ini tidak bisa disamakan dengan istilah 'intervensi' negara dibawah sistem kapitalis.

### **Pembangunan Ekonomi Dan Kebijakan Sosial**

Pembangunan ekonomi sangat penting bagi kesejahteraan. Secara global dan khususnya di negara-negara industri maju, pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluas kemampuan dan akses orang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Faktanya, dalam 30-40 tahun terakhir telah terjadi peningkatan standar hidup manusia secara spektakuler: usia harapan hidup semakin panjang, kematian ibu dan bayi semakin menurun, kemampuan membaca dan angka partisipasi sekolah juga semakin membaik.

Namun demikian, di banyak negara berkembang, globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah memperlebar kesenjangan, menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus budaya dan bahasa lokal, serta memperparah kemiskinan. Seperti dinyatakan Haque (Suharto, 2005a: 48): *Compared to the socioeconomic situation under the statist governments during the 1960s and 1970s, under the pro-market regimes of the 1980s and 1990s, the condition of poverty has worsened in many African and Latin American Countries in terms of an increase in the number of people in poverty, and a decline in economic growth rate, per capita income, and living standards.*

Kebijakan privatisasi, pasar bebas dan 'penyesuaian struktural' (*structural adjustment*) yang ditekankan lembaga-lembaga internasional telah mendorong negara-negara berkembang ke dalam situasi dimana populasi miskin mereka hidup tanpa perlindungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi penting, tetapi ia tidak secara otomatis melindungi rakyat dari berbagai resiko yang mengancamnya. Oleh karena



itu, beberapa negara berkembang mulai menerapkan kebijakan sosial yang menyangkut pengorganisasian skema-skema jaminan sosial, meskipun masih terbatas dan dikaitkan dengan status dan kategori pekerja di sektor formal.

Di beberapa negara, jaminan sosial masih menjangkau sedikit orang. Tetapi, beberapa negara lainnya tengah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kecenderungan ini setidaknya menggugurkan anggapan bahwa hanya negaranegara yang memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi saja yang mampu melakukan pembangunan sosial. Di negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa negara yang memiliki GDP tinggi belum tentu memiliki prosentase pengeluaran sosial yang tinggi pula.

Dengan kata lain, tinggi atau rendahnya pembangunan sosial di suatu negara tidak selalu ditentukan oleh kemampuan ekonomi negara yang bersangkutan. Spektrum mengenai hubungan antara pembangunan ekonomi (PE) dan pembangunan sosial (PS) dapat dilihat dari adanya empat kategori negara (Suharto, 2005a: 26)

Bila Indonesia dewasa ini hendak melakukan liberalisasi dan privatisasi ekonomi yang berporos pada ideologi kapitalisme, Indonesia bisa menimba pengalaman dari negara-negara maju ketika mereka memanusiaawikan kapitalisme. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ditanggulangi oleh berbagai skim jaminan sosial yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara nyata terutama oleh masyarakat kelas bawah.

### **Implementasi Kesejahteraan Ekonomi**

Sudah lebih dari 60 tahun sejak Republik Indonesia diproklamasikan sebagai negara kebangsaan dan negara kesejahteraan, namun wujud negara kesejahteraan itu belum tampak. Bahkan, kita menyaksikan dengan prihatin proses komersialisasi yang meluas dengan cepat di bidang pendidikan dan kesehatan, seiring dengan semakin terbatasnya APBN. Di tengah keterbatasan pemerintah menciptakan lapangan kerja dan menaikkan daya beli rakyat, kondisi itu amat menyakitkan kelompok rakyat yang tidak mempunya. Diperlukan reorientasi kebijakan pengelolaan negara demi kesejahteraan rakyat

Indonesia bisa saja menciptakan kesejahteraan ekonomi, namun hal tersebut tidak akan lepas dari keberadaan dan peran pemerintah, dan berbagai pihak yang memiliki kepentingan lain dari keberadaan perekonomian Indonesia saat ini. Dengan adanya permasalahan kenaikan harga BBM, pengurangan subsidi, adanya krisis energi dan pangan, masyarakat tidak seharusnya menjadi pasrah akan keadaan yang demikian namun perlu adanya pembinaan yang serius agar masyarakat tidak selalu berpangku tangan.

Masyarakat membutuhkan Berbagai macam binaan untuk menciptakan kesejahteraan perekonomian mereka sendiri dengan membuat kreatifitas yang tinggi, pemberdayaan industri kecil masyarakat, peningkatan UMKM, dan lain sebagainya. Kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, dan hanya sebatas wacana,

tetapi harus memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan keruhanian, dan implementasi yang sangat berarti.

Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kehidupan, kehormatan individu, masalah harta, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua;
2. Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat;
3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan; stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi;
4. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Cara lain menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat perwujudan tingkat tanggungjawab bersama dalam masyarakat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial.

Ekonomi Kesejahteraan, secara normatif yang layak dijadikan *better off* adalah para konsumen marjinal dan para produsen tertentu yang dipacu untuk meningkatkan kinerja ekonominya (produksi dan produktivitas). Tentu saja akan ada pihak yang *worse off* yakni pihak-pihak yang dianggap tidak perlu dibantu oleh pemerintah baik karena mereka berstatus konsumen strata ekonomi menengah-atas atau para pelaku ekonomi yang dianggap kuat untuk bersaing bebas dalam mekanisme pasar.

Untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan harus ada suatu sistem pasar yang sehat. Pasar itu sebenarnya adalah sebuah mekanisme yang canggih, namun gampang dirusak, untuk menata kehidupan ekonomi, sehingga setiap pribadi memberikan sumbangannya bagi keseluruhan dan juga memenuhi kebutuhannya sendiri dengan kebebasan penuh untuk melakukan pilihan pribadinya. Pasar yang sehat menggalakkan keragaman, prakarsa dan kreativitas pribadi, dan upaya-upaya yang produktif.

### **Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**

Sebelum sampai pada menemukan jalan keluar yang relevan, diperlukan refleksi yang secara mendasar dan menyeluruh mengenai fenomena makro ekonomi yang membuat semakin terpuruknya dan termarginalisasinya kegiatan-kegiatan ekonomi yang secara ekonomi, sosial dan geografis jauh dari pusat-pusat pertumbuhan.

Alternatif berpikir yang dikedepankan antara lain komunitas ekonomi rakyat sebagai salah satu sel penyusun tubuh ekonomi Negara, dan merupakan sumber kekuatan bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Untuk itu pemberdayaan ekonomi rakyat perlu memperoleh prioritas dalam pembangunan

ekonomi nasional, sehingga ekonomi rakyat (pengusaha kecil, menengah dan koperasi) dapat menjadi pelaku utama dalam perekonomian nasional, terutama dengan pengalaman masa krisis yang melanda perekonomian dewasa ini.

Berdasarkan perspektif tersebut, titik berat pemberdayaan ekonomi kerakyatan akan terletak pada upaya mempercepat pembangunan pedesaan sebagai tempat bermukim dan berusaha sebagian besar subyek dan obyek pembangunan bangsa ini, dimana mereka berusaha sebagai petani dan nelayan yang berpolakan *subsistence level*. Pada bagian lain pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilakukan harus mampu mengatasi dan mengurangi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pengusaha kecil, menengah, dan koperasi pada sektor industri pengolahan serta pedagang kecil (K5) disektor perdagangan dan jasa. Keterbatasan dan hambatan-hambatan tersebut antara lain keterbatasan sumberdaya manusia (norma dan organisasi), keterbatasan akses modal dan sumber-sumber pembiayaan aktivitas ekonominya sehari-hari.

Dengan demikian, perlu dikembangkan kemampuan profesionalisme pelaku usaha pada tiga sektor usaha kecil tersebut secara berkesinambungan, agar mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat mewujudkan peran utamanya dalam segala bidang yang mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.

Hal ini memungkinkan melalui upaya perbaikan dan pengembangan dalam pendidikan kewirausahaan dan manajemen usaha serta penataan sistem pendidikan nasional merupakan kunci utama peningkatan kualitas SDM pelaku usaha ekonomi kerakyatan pada masa mendatang, tanpa mengulangi kesalahan-kesalahan dan pengalaman 'pahit' pada masa lalu. Pada sisi yang lain, diperlukan peningkatan produktivitas dan penguasaan pasar agar mampu menguasai, mengelola dan mengembangkan pasar dalam negeri.

Peningkatan produktivitas dan kemampuan penguasaan pasar ini bukan hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha yang menunjang kegiatan produksi dan pemasaran. Lebih jauh dari itu, diperlukan pengembangan secara kelembagaan melalui program kemitraan usaha yang saling menguntungkan, sehingga secara kelembagaan institusi para pelaku usaha kecil, dan menengah tersebut, memiliki kemampuan dan daya saing pasar, terutama untuk mengisi pasar dalam negeri.

Di samping itu, upaya mendorong pembentukan kelembagaan swadaya ekonomi rakyat seperti kelompok pra-koperasi dan koperasi menjadi wahana meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing pelaku usaha kecil, yang bukan hanya tinggal di pedesaan, tetapi juga tersebar dan termarginalisasi dalam gemerlapnya kehidupan perkotaan. Dengan terbangunnya kemampuan kelembagaan ekonomi kerakyatan ini, diharapkan memiliki kemampuan dan kepercayaan dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan yang hendaknya dapat dikreasikan melalui sumberdaya pembiayaan sektor pemerintah, swasta dan swadaya masyarakat, bahkan sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri. Karenanya, diperlukan upaya secara selektif dan transparan serta sistematis pada

pengembangan sistem keuangan koperasi (atau pelaku ekonomi kerakyatan lainnya) yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan/atau lembaga-lembaga keuangan ekonomi modern lainnya, baik pada sektor pemerintah, swasta atau bahkan luar negeri.

## Kesimpulan

Masalah perekonomian bangsa Indonesia semakin sulit untuk dihadapi, ditambah dengan adanya kenaikan harga BBM yang kembali menghantui roda perekonomian masyarakat, masalah kenaikan harga pangan, dan krisis energi. Namun, dengan segala bentuk kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah, diharapkan pula sikap masyarakat untuk dapat menerima dengan segala konsekuensi yang telah diberikan. Peran masyarakat dengan pendapatan ekonomi yang lebih mampu juga diharapkan dapat membantu mereka yang tergolong tidak mampu.

Pemberdayaan ekonomi yang bermanfaat dan berkesinambungan seperti adanya UMKM juga diharapkan akan mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi yang ada dimasyarakat, walalupun sebagian besar keberadaan UMKM tersebut juga dikendalikan oleh kebutuhan barang-barang pokok yang harganya semakin meningkat, namun tidak menutup kemungkinan dengan kerjasama yang baik kesejahteraan masyarakat akan tercipta dengan baik.

Pasar yang sehat sangat tergantung pada kesadaran para pesertanya, sehingga harus ada persyaratan agar masyarakat umum menjatuhkan sanksi terhadap orang yang tidak menghormati hak dan kebutuhan orang lain, serta mengekang secara sukarela dorongan pribadi mereka untuk melampaui batas. Kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan keruhanian.

Melalui serangkaian kebijakan dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan berikutnya, negara memanglah harus semakin memantapkan eksistensi dan keberlanjutan negara; semakin mengamankan negara dari berbagai ancaman pada masa kini maupun pada masa depan; dan memajukan perikehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang, termasuk kesejahteraan ekonomi rakyat dan peradabannya.

## Daftar Pustaka

Begazo-Gomez, Tania, Alan Fuchs and Ari Perdana (2000). *“Does it Pay to Participate? Evidence Using the Indonesian Household Data.”* Unpublished paper, Harvard University (May 2006).

Gamal, Merza, <http://www.tazkiaonline.com> (07 Juni 2008)

Gamal, Merza, *Visi Kesejahteraan*, <http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/message/8933>, (30 Mei 2008)

Gamal, Merza, *Indikator Kesejahteraan Islami*, <http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com> (30 Mei 2008)

<http://andiirawan.com/2008/03/20/peruntukan-stabilisasi-harga-pangan-better-off-and-worse-off-in-food-price-stabilization/>. (07 Juni 2008)

<http://keyfighter.multiply.com/journal/item/2>, *Ekonomi Islam for Economic Welfare*, (23 Mei 2008)

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/29/PendLN/995350.htm>  
*Restrukturisasi Pendidikan Tinggi di Eropa*, (23 Mei 2008)

<http://www.halalguide.info/content/view/785/46/>, *Moralitas Pasar dan Kesejahteraan*, (10 Juni 2008)

<http://www.opensubscriber.com/message/stop.privatisasi@yahoo.com/71545.htm>

[http://www.ekonomi.lipi.go.id/informasi/berita/berita\\_detil2.asp?Vnomer=357](http://www.ekonomi.lipi.go.id/informasi/berita/berita_detil2.asp?Vnomer=357) *www.media-indonesia.com* - Selasa, 19 Juni 2007

<http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/05/27/20/112781/jk-2010-pertumbuhan-ekonomi-9>, (27 Mei 2008)

Hamid Fahmy Zarkasyi, "*Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam*", *Islamia Tahun II No. 5*, April-Juni 2005

Khursid Ahmad, 1997, "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam", dalam Ainur R. Sophian (Ed), "Etika Ekonomi Politik; Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam", Surabaya: Risalah Gusti.

M. Umer Chapra, "Negara Sejahtera Islami dan Peranannya di Bidang Ekonomi", dalam Ainur R. Sophian (Ed), *Ibid*

Mubyarto, *Promosi UMKM dan Ketimpangan Ekonomi*, <http://www.hupelita.com/baca.php?id=11065>. (07 Juni 2008)

Prospek Ekonomi Rakyat, <http://www.opensubscriber.com/message/stop-privatisasi@yahoo.com/71545.html>. (30 Mei 2008)

Wilber Moore, 1955, *Economy and Society*, Random House.